

Andriea Salamun :

# APA YANG KITA INGAT DARI GUS DUR? SANG BAPAK PLURALISME INDONESIA



Audiensi Gus Dur dengan warga Tionghoa di Istana Negara. Jakarta, 31 Desember 2000. (Sumber: Setneg)

**G**itu aja kok repot, kalimat itulah yang sering kita ingat dari seorang Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia keempat. Gus Dur, begitu beliau sering dikenal merupakan seorang tokoh yang tidak hanya sebagai seorang ulama namun juga sebagai tokoh pluralis yang memerhatikan kepentingan kelompok minoritas di Indonesia. Abdurrahman Wahid dilahirkan pada tanggal 4 Agustus 1940 di Jombang, dari lingkungan sentral NU (Nahdhatul Ulama). Ayahnya adalah K.H Wahid Hasyim, putra pendiri NU K.H Hasyim Asy'ari dan merupakan salah seorang penanda tangan Piagam Jakarta serta Menteri Agama pada kabinet Hatta, Natsir dan Sukiman.

Gus Dur menempuh pendidikan

dasar di Jombang, lalu meneruskan SMTP dan SMTA di Yogyakarta dan Jakarta. Sebagai anak keluarga besar pesantren, ia juga banyak mengenyam pendidikan pesantren di beberapa tempat. Ia pernah mengenyam pendidikan pesantren Telagreja di Magelang selama tiga tahun sejak 1956 dan melanjutkan ke pesantren Tambakberas Jombang selama empat tahun serta pernah berada di pesantren Krapyak Yogyakarta.

Tahun 1964-1966, ia melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar Kairo pada *Departemen of Higher Islamic and Arabic Studies*. Namun ia tidak sempat menyelesaikan pendidikannya karena suasana yang kurang kondusif sehingga praktis selama dua tahun

banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan nasional Mesir serta perpustakaan kedutaan Amerika dan Perancis, disamping juga aktif dalam berbagai forum kajian. Selepas dari Kairo, ia pindah ke Universitas Baghdad dan masuk pada Fakultas Sastra sampai tahun 1970 ketika ia dipanggil pulang ke Indonesia.

Setelah itu Gus Dur aktif untuk mengembangkan pendidikan pesantren di Indonesia dan pada muktamar NU di Situbondo tahun 1984, bersama dengan KH Achmad Shiddiq, terpilih masing-masing sebagai Ketua Tanfidziyah dan Syuriah PBNU. Posisi ini bertahan sampai dipilih kembali pada muktamar di Yogyakarta tahun 1989. Sampai dengan muktamar di

Cipasing tahun 1994, kedudukan Gus Dur masih kuat dan tetap dipercaya memimpin organisasi Islam terbesar ini bersama K.H Ilyas Ruchiyat. Di luar organisasi NU, ia aktif di forum Demokrasi dan forum-forum lainnya, baik nasional maupun internasional.

Pada saat reformasi Gus Dur mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa tahun 1998 dan saat Pemilu 1999 PKB memperoleh suara ketiga terbesar. Kemunculan Gus Dur sebagai tokoh politik pada saat itu mendapatkan dukungan dari masyarakat. Buktinya pada tahun 1999, saat dilakukan pemilihan Presiden oleh anggota DPR/MPR, ia terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan B.J Habibie.

**Bapak Tionghoa dan Otonomi Khusus Papua**

Saat menjadi Presiden, Gus Dur identik untuk mengangkat nilai-nilai budaya dalam setiap kebijakan yang dibuatnya. Dalam hal tipe pemimpin menurut Gregg Thompson dan Bruna Martinuzzi menjelaskan adanya dua tipe kepemimpinan, pertama mengedepankan *soft power*, yaitu pemimpin yang memiliki kepribadian menarik, budaya, nilai-nilai, dan kekuasaan moral menjadi kekuatan untuk memikat hati orang tanpa memanipulasi mereka dengan rangsangan yang bersifat material. Sedangkan sebaliknya, tipe kedua adalah kepemimpinan yang mengedepankan *hard power* yaitu kekuatan berupa *reward, punishment*, atau alat lainnya yang bersifat material dan digunakan untuk mendapatkan dukungan publik.

Buktinya, keputusan-keputusan yang dilakukan Gus Dur menyentuh kepada kelompok minoritas di Indonesia. Antara lain, ia mengeluarkan Keputusan Presiden



Berkas Penyusunan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Sumber: ANRI, Daftar Arsip Setneg 1950-2004, No. 933)

Nomor 6 Tahun 2000 yaitu pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang berisi larangan segala kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat China yang dilakukan di Indonesia. Keputusan ini memperbolehkan bangsa Tionghoa dapat mengekspresikan kebudayaannya termasuk kebebasan menjalankan agama di Indonesia. Selain itu Gus Dur juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 yang menetapkan Hari Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Dua keputusan ini menjadi bukti bahwa Gus Dur memiliki pandangan yang universal dan tidak diskriminatif terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Tentu saja dua keputusan ini juga membuktikan bahwa Gus Dur mengangkat nilai-nilai budaya sebagai bagian dari tipe kepemimpinan *soft power* nya. Untuk itu pada tanggal 10 Maret 2004, Gus Dur dinobatkan sebagai “Bapak Tionghoa”

oleh beberapa tokoh Tionghoa di Semarang.

Lebih daripada itu yang menarik dari pemerintahan Gus Dur adalah saat ia mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (Arsip Nasional Republik Indonesia No. 933 Daftar Arsip Setneg 1950-2004). Undang-Undang ini menjadi angin segar bagi masyarakat Papua karena pemerintah memperhatikan aspirasi mereka agar tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Papua bukanlah hanya sekedar penamaan namun adalah sebuah identitas bagi masyarakatnya dan sejak saat itu nama Provinsi Irian Jaya berubah menjadi Provinsi Papua. Dengan adanya otonomi khusus tersebut dampaknya tentu sangat besar bagi masyarakat Papua hingga saat ini.

Tentunya masih banyak kebijakan-kebijakan lainnya yang dihasilkan

era pemerintahan Gus Dur namun pertanyaannya adalah apakah kita ingat akan kebijakan yang telah dibuat Gus Dur saat menjadi Presiden?. Pertanyaan ini akan dapat dijawab apabila kita memiliki bukti sejarah melalui sebuah arsip yang tersusun dengan baik. Arsip menjadi penting bukan hanya menghasilkan sebuah informasi namun fisik arsip yang terpelihara dapat menjadi bukti keberadaan sebuah pemerintahan.

### **Arsip Sebagai Memori Kolektif Bangsa**

Banyak kebijakan yang dibuat oleh Gus Dur, dan tentunya banyak yang tidak mengetahui mengapa kebijakan tersebut dibuat. Seperti halnya Gus Dur selalu berpihak pada kaum minoritas dan pemikirannya terhadap penolakan Negara Islam di Indonesia padahal ia memiliki latar belakang kesantunan yang sangat kental. Dalam sebuah buku yang ditulis Gus Dur, ia menyatakan bahwa Islam adalah jalan hidup (syariah) yang tidak memiliki konsep jelas tentang negara. Bahkan ia juga mengatakan bahwa dalam pandangan Islam tidak ada keharusan untuk mendirikan sebuah sistem Islam. Jika terdapat negara yang berlandaskan Islam sebagai konstitusinya akan terjadi bias batas kewenangan negara dalam mengelola masyarakatnya mengingat luasnya cakupan Islam (2006:14). Catatan ini menjadi salah satu pemikiran Gus Dur tentang pentingnya toleransi dalam kehidupan beragama, terutama di Indonesia yang masyarakatnya heterogen.

Dari pemikiran seperti inilah, Gus Dur berusaha mencari terobosan-terobosan baru dalam rangka mensintesakan wawasan keislaman dengan keindonesiaan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara bangsa. Dan atas dasar ini pulalah

Gus Dur mengkritik kecenderungan sejumlah besar kalangan pergerakan Islam yang berpegang pada pola idealistik yang menganggap Islam sebagai alternatif terhadap paham-paham kenegaraan lain. Dalam konteks inilah Gus Dur menegaskan bahwa yang diajukan sebagai agenda adalah bagaimana menjadikan Islam sebagai “pemberi warna tunggal” bagi kehidupan masyarakat. Islam dijadikan alternatif terhadap berbagai macam persoalan bangsa, termasuk kesadaran berbangsa dalam arti *nation*“.

Untuk itu arsip kepresidenan dibutuhkan untuk melihat pemikiran, kebijakan, konstitusi, dan pertanggung jawaban sebuah rezim pemerintahan. Arsip tentang Gus Dur sangat menarik untuk ditelusuri karena gaya kepemimpinan Gus Dur yang berbeda dari Presiden terdahulu. Informasi yang didapatkan melalui arsip menjadi sebuah memori kolektif bangsa karena masyarakat dapat mempelajari pemikiran Gus Dur dalam mengelola pemerintahan, bagaimana kabinet menteri bekerja, kebijakan dan peraturan yang telah dibuat, dan mengenal tokoh-tokoh yang terlibat pada masa itu. Dengan mempelajari arsip semua fakta maupun isu yang terjadi pada masa itu dapat terpisahkan dengan jelas.

Pentingnya arsip tentang Gus Dur menjadi bagian dari sejarah pemerintahan bangsa Indonesia. Jika mantan Presiden Soekarno dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan gagah berani berhasil memproklamkan kemerdekaan Indonesia. Dan mantan Presiden Soeharto dengan kekuatan politiknya berhasil menciptakan stabilitas politik nasional dan memberi warna pembangunan di segala bidang. Kemudian dilanjutkan oleh mantan

Presiden Habibie, walupun singkat namun memberi andil dalam pengembangan industri pesawat terbang dalam negeri. Maka sebagai mantan Presiden, Gus Dur tidak cukup hanya dikenal dari sebuah kata-katanya “Gitu Aja Kok Repot” karena Gus Dur telah berhasil membangun nilai dan budaya untuk saling menghargai satu sama lain di dalam masyarakat Indonesia yang heterogen.

Jika arsip tentang Soekarno dan Soeharto sebagai Presiden pada masanya sangat banyak ditemui dalam berbagai bentuk, baik itu arsip kertas, foto, maupun film. Untuk itu Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai penyelenggara kearsipan nasional memiliki kewajiban untuk menelusuri dan menyajikan arsip kepresidenan kepada masyarakat sebagai memori kolektif bangsa. Kesenambungan antara satu pemerintahan dengan pemerintahan selanjutnya akan menjadi bukti sejarah perjalanan bangsa.

Untuk itu Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai penyelenggara kearsipan menjadikan arsip kepresidenan sebagai program dalam upaya memberikan informasi kepada masyarakat sebagai wujud memori kolektif bangsa. Dalam rangka mengelola arsip kepresidenan tersebut dibutuhkan kerjasama dengan lembaga-lembaga Negara terutama Sekretariat Negara dan Sekretariat Presiden dikarenakan banyak arsip-arsip yang menjadi provenance kedua lembaga tersebut. Apalagi informasi tentang arsip kepresidenan menarik untuk dimanfaatkan agar kita dapat belajar tentang kebijakn dan pemerintahan. Dan diharapkan agar arsip kepresidenan mampu menjadi simpul pemersatu bangsa terhadap berbagai persoalan bangsa ini.